

PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO PADA MELANTIKAN PANITIA
GALANGAN KAPAL "CARYA PUTRA DOCKYARD", ISTANA MERDEKA,
DJAKARTA, 3 DESEMBER 1964.

Saudara-Saudara,

Keputusan Presiden yang saya tandatangani pada tanggal 17 Nopember yang lalu, dan yang dibatjakan oleh Jang Mulia Menteri Sekretaris Negara, sudah djelas. Kata orang asing, daar is geen woord Frans bij, djelas.

Maka saja kira kita semuanya telah memahami dan menginsafi bahwa Carya Putra Dockyard adalah benar-benar satu hal yang amat penting bagi, bukan sadja kenaritimannya kita, tetapi djuga satu hal penting dalam nation building kita, oleh karena kita adalah satu bangsa yang berdiam diatas kepulauan, satu bangsa yang harus mengharungi lautan, bukan sadja interinsuler, tetapi djuga internasional.

Karena itu saja mengadakan usaha agar supaya Indonesia lekas mempunyai satu dockyard, supaya bisa membuat kapal-kapalnya sendiri, dan perintah saja berikan ialah supaya dockyard ini djangan ketjil-ketjilan. Dockyard ini harus dapat membuat kapal dari 10 ribu ton sampai kepada 150 ribu ton. Dockyard ini akan mendjadi satu dockyard yang terbesar di seluruh Asia. Saja belum berani berkata terbesar diseluruh dunia. Tetapi zeker, Insaja Allah SWT, yang terbesar diseluruh Asia. Bukan sadja hal yang demikian itu akan memenuhi kebutuhan kita untuk mendjadi bangsa maritim, untuk membangun bangsa kita mendjadi satu bangsa yang kuat sentausa, tetapi djuga akan memberi kepuasan dan kebanggaan subjektif kepada kita.

Karena itu saja printahkan kepada Saudara-Saudara yang berdiri dihadapan saya ini, Saudara Subandrio, Saudara Leimena, Saudara Chaerul, Saudara Martadinata, Saudara Jusuf Muda Dalam, Saudara Ali Sadikin, Saudara Surjadi dan Saudara Mardanus, wel, pundak dibawah taak yang hebat ini! Kita harus didalam waktu yang sesingkat-singkatnja memiliki dockyard yang dimaksudkan itu.

God speed, kerdja keras! Saja selalu doakan agar supaya Tuhan menjertai kita djuga didalam hal ini.

Bismillah, dengan ini saja lantik dengan resmi Saudara-Saudara sebagai penjelenggara daripada Carya Putra Dockyard ini.



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANo. 295 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa dalam perdjuaan membangun ekonomi nasional maupun membina Negara Maritim, kelantjaran pelaksanaan pembangunan projek Dok dan Galangan Kapal "Carya Putra" atau "Carya Putra Dockyard" di Tjilintjing - Tandjung - Priok - Djakarta, perlu didjamin sepenuhnya;
2. bahwa untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan pembangunan projek "Carya Putra Dockyard" tersebut, perlu diambil tindakan pentjegahan adanja/timbulnja hambatan-hambatan dan atau pemogokan/penutupan (Lock-out);
3. bahwa melihat besar dan pentingnja projek "Carya Putra Dockyard" tersebut, perlu dan pantas didjadikan projek mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67);
3. Penjerahan mandat dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.) kepada Presiden, jang berarti Presiden dapat bertindak selaku Mandataris M.P.R.S.;

Mendengar : Presidium Kabinet "Dwikora", Menteri Panglima Angkatan Laut dan Menteri Urusan Bank Sentral;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Projek "Carya Putra Dockyard" jang berkedudukan di Tjilintjing - Tandjung Priok - Djakarta dengan seluruh bagian-bagiannja jang merupakan satu unit jang tiada terpetjah-petjah, dinjatakan sebagai badan vital sebagaimana termaksud dalam Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.67);
- KEDUA** : Projek "Carya Putra Dockyard" tersebut dinjatakan pula sebagai projek Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.);
- KETIGA** : Terhitung mulai tanggal 17 Nopember 1964 menundjuk sebagai anggota-anggota Badan Pembina/Pengawas dan Direksi "Carya Putra Dockyard" sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|---|
| I. Pembina Pengawas Tertinggi | : Presiden Republik Indonesia, Sukarno. |
| II. Pembina/Pengawas | : Presidium Kabinet "Dwikora" beserta : |
| | - Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan; |
| | - Menteri Panglima Angkatan Laut. |
| | - Menteri Perhubungan Laut; |
| | - Menteri Urusan Bank Sentral; |
| | - Menteri Urusan Anggaran Negara. |

III. Pengawas

0. 3139086

AIRKEMONTI KILIMUT-12 -

III. Pengawas Harian

: Menteri Perhubungan Laut;
dibantu oleh suatu Sekretariat
yang terdiri dari wakil2 :

- Departemen Perhubungan Laut;
- Departemen Perindustrian
Dasar dan Pertambangan;
- Departemen Angkatan Laut;
- Pemerintah Daerah Khusus
Ibukota Djakarta Raya.

IV. Direksi

- 1. Presiden Direktur : Jusuf Muda Dalam;
- 2. Direktur : Drs. Surjadi;
- 3. Direktur : M a r d a n u s .

KEEMPAT : Direksi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dapat
mengangkat penasehat-penasehat ahli yang dipandang perlu
untuk melantjarkan djalannya pekerdjaan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 17 Nopember 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Sesuai dengan yang asli

SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

ttd.

DJAMIN.